

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa) SWADESA ARTA MANDIRI
DESA WONOMARTO KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Dakwah**

OLEH:

**MUHAMMAD SAFERI
NPM: 1641020118**

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa) SWADESA ARTA MANDIRI
DESA WONOMARTO KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Dakwah**

Oleh

**MUHAMMAD SAFERI
NPM : 1641020118**

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si

Pembimbing II : Drs.Mansur Hidayat,M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTANLAMPUNG
1442 H /2021 M**

ABSTRAK

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu Negara. Disinilah banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, salah satu nya ialah pemanfaatan kotoran ternak yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kemudian ada beberapa potensi lokal juga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara antara lain daun kelor dan buah pare yang di ubah menjadi keripik. Maka dengan itu BUMDes Swadesa Artha Mandiri hadir ditengah tengah masyarakat, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan dapat mengembangkan kapasitas masyarakat. Maka dengan itu BUMDes Swadesa Artha Mandiri membentuk kelompok usaha, agar memudahkan masyarakat dalam menjalankann aktivitas nya seperti memanfaatkan ternak kotoran kambing,daun kelor dan buah pare. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran data lengkap yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menentukan Partisipan, menggunakan teknik *Purposive sampling*. Partisipan ini berjumlah 15 orang. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa proses pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes berjalan dengan baik melalui tahap-tahap Penyuluhan, Pembentukan Kelompok Usaha, Pelatihan dan Pendampingan, maka dengan ini masyarakat di Desa Wonomarto kabupaten Lampung Utara memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah tersebut dengan memanfaatkan kotoran ternak kambing untuk dijadikan sebagai Pupuk Kompos,daun kelor yang di olah menjadi keripik daun kelor serta buah pare yang di ubah menjadi keripik pare.

Kata Kunci. Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Saferi
NPM : 1641020118
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara” adalah Hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 September 2021

Penulis,

Muhammad Saferi
NPM. 1641020118



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame-Bandar Lampung, dp. (0221) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

PEMBERDAYAAN MASYAKAT MELALUI BUMDES (Badan
Usaha Milik Desa) SWADESA ARTHA MANDIRI DESA
WONOMARTO KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nama

Muhammad Saferi

NPM

1641020118

Jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Khomsarial Romli, M.Si


Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I

NIP. 196104091990031002

NIP. 196508171994031005

Ketua Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. M. Mawardi J. M. Si

NIP. 196612221995031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukurame-Bandar Lampung, lrp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skrripsi, dengan judul: **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) SWADESA ARTHA MANDIRI DESA WONOMARTO KABUPATEN LAMPUNG UTARA** yang disusun oleh Muhammad Saferi NPM. 1641020118, Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah pada hari/tanggal: Senin, 17 September 2021

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Dr. M. Mawardi J. M.Si

Sekretaris : H. Zamhariri, S.Ag. M.Sos.I

Penguji I : Dr. Faizal, S.Ag. M.Ag

Penguji II : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Penguji II : Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP. 196104091990031002

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS Ar-Rad’u: 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur dan Alhamdulillah Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Ayahandaku tercinta Bapak Aripin (Alm) dan Ibundaku Tersayang Ibu Sundari atas pengorbanan selama ini sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang, yang tidak pernah lelah dan bosan dalam bekerja keras dan berdoa untuk kebaikan dan masa depanku, hanya Allah yang bisa membalas segalanya kebaikan kalian.
2. Kaka-kakakku tercinta, Leli Parida, Jamil, M.Basir, Wulan Monika, Aswati, Herdian dan M.Sundar serta adikku tersayang Ahmad Dzaki dan Zakiya Parida yang selalu memberikan dorongan dan semangat demi keberhasilanku
3. Sahabat-Sahabatku Abdi Rahmandika, M.Nando Wahid, Agung Riskillah, M.iqbal Al Hasan, Rohman, Kak Ahmad serta rekan-rekan Ahsya Management terimakasih yang sudah mensupport sampai pada tahap yang sekarang ini .
4. Orang terdekatku Siti Istiqomah di ucapkan banyak terima kasih atas semangat dan dorongan selama ini.
5. Teman Teman Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI C), Febri, Holid, Yosi, Rifa'i, Rosita dan lain-lain terimakasih atas rasa saling support , saling mendoakan selama ini, terus berjuang dan berkarya.
6. Anggota BUMdes Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Bapak Waskito, Ali hasan dan yang lainnya terma kasih telah bekerja sama dalam mengumpulkan berbagai informasi.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Saferi adalah Putra ke 6 dari 6 Bersaudara yang di Lahirkan Dari Pasangan Suami Istri Bapak Aripin (Alm) dan Ibu Sundari yang Dilahirkan Pada Tanggal 01 April 1998 di Ketapang, Kampung Pisang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara..

Jenjang Pendidikan Formal yang penulis jalani adalah

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Ketapang Lulus Pada tahun 2010
2. MTS Nurul Umah Ketapang Lulus Pada Tahun 2013
3. SMAN 02 Kotabumi Lulus Pada Tahun 2016

Selanjutnya pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 14 September 2021
Yang Membuat,

Muhammad Saferi
1641020118

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah, yang berhak dipuji karena nikmat yang begitu besar telah diberikan kepada kita semua. Tidak ada sedikit perjuangan pun yang luput dari pengawasan-Nya, karena Dialah yang mengatur jiwa-jiwa kita. Semoga keberkahan senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diberikan syafaatnya dihari kiamat.

Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang penelitian untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dan Alhamdulillah telah menyelesaikannya dengan ketentuan yang ada.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H, Khomsarial Romli, M. Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Mawardi J,M.Si, Selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam serta Bapak H. Zamhariri, S.Ag M. Sos.I, selaku seketaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak selaku Prof. Dr. H, Khomsarial Romli, M. Si Pembimbing I dan Bapak Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bantuan, Pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis
6. Pihak perpustakaan pusat dan juga perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku buku referensi.

Akhirnya ungkapan Doá terucap dengan ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, September 2021

Penulis

Muhammad Saferi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian	12
2. Desain Penelitian	13
3. Tempat dan Partisipan Penelitian.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data	17
6. Pemeriksaan Keabsahan Data	18
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BUMDES SEBAGAI LEMBAGA (INSTITUSI) MASYARAKAT

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	21
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	22
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat	25
4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	27
5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	29
B. Konsep BUMDes.....	31
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	31
2. Tujuan Pendirian BUMDes	34
3. Jenis-Jenis BUMDes	34
C. Teori Pengorganisasian.....	36
1. Pengertian Pengorganisasian	36
2. Teori-Teori Pengorganisasian.....	38
3. Langkah-Langkah Pengorganisasian	38
4. Fungsi Pengorganisasian	40
D. Konsep Lembaga (Institusi) Masyarakat.....	41
1. Pengertian Lembaga (Institusi) Masyarakat	41
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga (Institusi) Masyarakat	43
3. BUMDes Sebagai Lembaga (Institusi) Masyarakat	43

BAB III GAMBARAN UMUM DESA WONOMARTO BUMDES SWADESA ARTHA MANDIRI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN *LIFE SKILL*

A. Gambaran Umum Desa Wonomarto	47
1. Sejarah Singkat Desa Wonomarto	47
2. Kondisi Geografis Desa Wonomarto	48
3. Kondisi Demografi Desa Wonomarto	48
B. Gambaran Umum BUMDes Swadesa Artha Mandiri	50
1. Sejarah Singkat BUMDes.....	50
2. Tujuan Pendirian BUMDes	50
3. Struktur Organisasi BUMDes.....	52

C. Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes	
Dalam	
Pengembangan <i>Life Skill</i>	53
1. Penyuluhan	53
2. Pembentukan Kelompok Usaha.....	54
3. Pelatihan.....	55
4. Pendampingan	59

BABIV ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES SWADESA ARTHA MANDIRI DI DESA WONOMARTO KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Swadesa Artha Mandiri Di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara	63
---	----

BAB V KESIMPULAN SARAN PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi Penulis	70
C. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Agama48
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian49
3. Tebel 3 Data Kegiatan Pemberdayaan58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara/Interview
2. Pedoman Observasi
3. Pedoman Dokumentasi
4. SK Judul
5. Surat Kesbangpol
6. Kartu Konsultasi
7. Hasil Turnitin
8. Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Berdasarkan penjelasan judul ini penulis akan menjabarkan tentang isi Skripsi yang akan penulis teliti, dalam hal ini judul yang penulis maksud adalah: **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara.** Maka dalam penjelasan skripsi ini agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman yang terdapat di dalamnya penulis akan sedemikian rupa menjelaskan segala kandungan yang terdapat di dalam skripsi ini, adapun beberapa istilah yang akan penulis jelaskan yaitu

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.¹ Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat² Pemberdayaan Masyarakat adalah Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan social.³

Pemberdayaan masyarakat juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah seberapa

¹Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.61.

² Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*,, h.51

³Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008) h. 96

besar partisipasi atau keberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.⁴

Menurut penulis dapat disimpulkan, Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Begitu pula yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu upaya yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa Dengan mengadakan pelatihan untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga masyarakat mampu dalam meberdayakan dirinya sendiri.

Kemudian BUMDes memanfaatkan potensi lokal yang berada di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung utara, maka potensi local yang ada di desa tersebut yaitu ternak kambing, dengan adanya ternak kambing yang sudah ada, masyarakat memanfaatkan kotoran kambing itu untuk dijadikan sebagai pupuk kompos, yang nantinya akan dijual di pasaran. Masyarakat tersebut memang sudah terbentuk menjadi sebuah kelompok ternak kambing, yang kemudian diberikan pelatihan dan pembinaan.

Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan lembaga yang mampu membantu masyarakat dalam berbagai hal/kegiatan antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menciptakan lapangan pekerjaan dalam pengelolaan potensi lokal yang ada dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam

⁴Haryono Suryono, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 51

pemanfaatan potensi lokal yang ada.⁵ BUMDes menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PADES). Melalui lembaga BUMDes membantu kebutuhan dana masyarakat, selain itu bumdes berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Pendirian Bumdes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha yang dilakukan masyarakat dari ancaman para pemodal besar.

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dengan pendiriannya, BUMDes dibangun atas dasar prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan peluang usaha yang di hegemoni oleh beberapa kalangan, artinya dalam tata pengelolaannya dengan sistem kelembagaan yang solid, penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tatanan peraturan yang mengikat seluruh anggota.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penulis maksud disini, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara, upaya dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal yang berada di wilayah tersebut, melalui pelatihan sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang berada di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat sehingga

⁵ Ahmad Dian, Badan Usaha Milik Desa – Ciri ciri, Tujuan, Landasan Hukum, Jenis Usaha, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa>, di akses pada tanggal 20 Januari 2017

⁶ Nur Fatin, Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya, <http://seputar-pengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentukannya.html>, 28 Juli 2018

masyarakat bisa menjadi lebih mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dengan itu Realitas yang ada bahwa BUMDes Artha Mandiri , memberikan kontribusi kepada masyarakat di Desa Wonomarto yang tidak memiliki pekerjaan , maka dengan itu masyarakat berkontribusi dengan kegiatan yang diadakan oleh BUMDes. Kegiatan tersebut antara lain Pembentukan kelompok, sekaligus memberikan pemahaman pembinaan dan pelatihan dalam memanfaatkan potensi local yang ada. Seperti memanfaatkan kotoran ternak kambing yang dijadikan sebagai pupuk kompos. Dalam pembentukan kelompok masyarakat yang berkontribusi berjumlah 15 orang yang ikut berpartisipasi. BUMDes juga memberikan bantuan , kepada masyarakat berupa kambing, yang nantinya kambing tersebut ditenak dan dimanfaatkan oleh masyarakat local yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan dan memandirikan rakyat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan maka harus adanya pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam sebaikbaiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya berupa pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan agar dapat memanfaatkan potensi alam secara maksimal. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam setiap masyarakat tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Setiap wilayah memiliki sumber dan potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya mengandalkan penghasilannya dari potensi alam yang ada.

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang

tersedia di dalamnya. Pengembangan basis ekonomi dipedesaan sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah semanjak orde baru, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal. Salah satu faktor yang paling dominan adalah peran pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan dengan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga membuat masyarakat tidak mandiri.

Banyaknya potensi didesa dapat menambah penghasilan masyarakat namun dalam tahun pertama hasil sumber daya alam mengalami penurunan harga, bahkan ada yang turun setengah harga dari harga awal, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi petani di wilayah tersebut seperti petani Singkong, Jagung, Semangka. Selain itu juga masyarakat juga kurang memanfaatkan sumberdaya alam secara maksimal dan hanya mengelola hasil sumberdaya local ,dengan demikian banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan membutuhkan adanya penanganan dalam memanfaatkan sumberdaya Lokal secara maksimal.⁷

Sebagai proses di dalam pembangunan, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat. Para teoritis, seperti Seeman, Seligman dan Learner yang dikutip oleh Edi Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian.”⁸

Proses pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan meskipun sedikit. Sebagai subjek masyarakat, harus menjadi pelaku dan penentu keputusan

⁷ Hasil Observasi di Desa Wonomarto, 18 Mei 2019

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke-lima, 2014)

dalam proses perencanaan agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan. Namun, kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian dan perencanaan masih serba sedikit, apalagi untuk masyarakat pedesaan mereka harus dibantu, didorong, didampingi dan ditingkatkan kemampuannya karena masyarakat pedesaan masih sulitnya menerima budaya modernisasi, sulit menerima teknologi baru, tidak mempunyai motivasi kuat dan cukup dengan pemenuhan kebutuhan kebutuhan pokok yang paling dasar.

Peraturan desa antara lain bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.⁹ Namun saat ini masih sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya, hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia didesa disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan potensi alam secara maksimal.

Berdasarkan Undang-undang No.6 tentang Desa tahun 2014 pasal satu yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁹

Penjelasan undang-undang di atas sangat jelas bahwa pemerintah memberikan kebijakan kepada desa atau nama lainnya mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berbagai cara telah digunakan oleh pemerintah untuk memajukan desa agar tidak selalu tertinggal dan diremehkan dan tidak hanya dijadikan objek pembangunan, namun

⁹ Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1 , tahun 2014, http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kewirausahaan desa yang diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat didesa. BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).¹⁰

Istilah BUMDes tersebut juga pertama kali muncul melalui PP No 72/2005 tentang pemerintah desa. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui undang-undang no.6 tahun 2014 yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” Sebagai lembaga usaha desa, BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.¹¹

¹⁰ Nur Fatin, Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html> di akses pada tanggal 17 Agustus 2021

¹¹Undang-undang No 6 tentang Desa BAB 1 ayat 1, tahun 2014, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

BUMDes berfungsi untuk menstimulus, memfasilitasi, dan melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Bumdes berperan mengatur perekonomian yang ada didesa sehingga BUMDes dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat itu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara merupakan desa yang dikenal dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik pula dan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tanggal 28 April 2016 dengan nama Badan Usaha Milik Desa Swadesa Artha Mandiri. BUMDes disini memiliki unit simpan Pinjam, Pengelolaan pasar, dan Unit usaha yang berbahan dasar dari potensi alam yang ada di daerah tersebut seperti Singkong, Jagung dan Semangka.

Pemerintah Desa di Desa Wonomarto mendirikan BUMDes berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagai upaya pendayagunaan potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar, sosial, budaya dan alam, mampu dikelola sebesar-besarnya oleh desa khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa Wonomarto merupakan Daerah yang berada tidak jauh dari sarana transportasi dan wilayah nya mudah dijangkau maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk mendirikan atau membangun BUMDes di Daerah tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan daerah tersebut¹²

Untuk meningkatkan perekonomian di Desa Wonomarto maka BUMDes Swadesa Artha Mandiri memberdayakan masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di wilayah tersebut. Mayoritas mata pencaharian penduduk dengan adanya BUMDes Swadesa Artha Mandiri masyarakat juga mengelola potensi local seperti ternak kambing yang mana kotoran kambing dijadikan sebagai pupuk kompos di jual namun dengan adanya BUMDes masyarakat diberikan pelatihan dan diberikan modal untuk mengelola potensi

¹² Hasil Observasi di Desa Wonomarto, 18 Mei 2019

local tersebut agar dapat menambah nilai jual, seperti dijadikan kotoran kambing sebagai pupuk kompos yang nantinya dijual di pasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penulis maksud studi tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara. bahwa upaya BUMDes dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kegiatan dan bantuan seperti kambing bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian kambing yang diberikan oleh pihak BUMDes Swadesa Artha Mandiri itu di ternak oleh masyarakat setempat dan dimanfaatkan kotoran kambing dan dijadikan sebagai pupuk kompos.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan Sub Fokus Penelitian pada penelitian ini terkait pada Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara., sehingga dari hal ini dapat diketahui sub fokus pada penelitian ini yaitu BUMDes Swadesa Artha Mandiri dalam memberikan kegiatan berupa Pelatihan Pembinaan dan Pendampingan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Swadesa Artha Mandiri dalam Pengembangan Life Skill Di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan Untuk Mendeskripsikan Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Swadesa Artha Mandiri dalam Pengembangan Life Skill Di Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis karya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang pemberdayaan Masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes).
2. Secara praktis diharapkan untuk memberi masukan pada Instansi dan Organisasi Masyarakat setempat untuk membantu daerah daerah tertentu untuk lebih mandiri dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti lainnya. Selain itu dalam referensi ini dibutuhkan beberapa referensi yang di antaranya Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan sebagai bentuk pengkayaan akan referensi yang diteliti gunakan sebagai dasar dan penguat untuk penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Syafrida yang berjudul “ pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tangjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”, (2018), Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan. Skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat desa di desa Dalu X A, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 pendekatan utama tujuan upaya itu harus terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dan melalui pendekatan kelompok. Hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes sudah berjalan secara efektif dilihat dari penjualan beras yang dikelola oleh masyarakat Desa, dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan

adanya sistem menyicil dan harga relatif lebih murah dari harga toko lain.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara M.Atzil M.A, yang berjudul “ Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, (2017), Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengolahan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Dengan adanya BUMDes menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Satika Rani, yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi Islam study pada BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan”. (2018).mahasiswa jurusan Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan tentang peran dan kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini 24 menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi Mulya Sari cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adaya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari.

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa memang pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki Manfaat yang bagus untuk

masyarakat dan juga menambah peluang untuk masyarakat dalam meningkatkan ekonominya sehingga mampu memandirikan masyarakat. Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes hanya saja dalam penelitian penulis ini yang menjadi fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat yang menggunakan tahapan pemberdayaan yang dimulai dari seleksi wilayah hingga pemandirian masyarakat

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi valid, maka dalam tulisan ini akan mengurai metode penelitian yang digunakan:

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola hukum tertentu menurut hukum logika.¹³

Penelitian kualitatif memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul dilapangan dan terus menerus secara disempurnakan selama proses penelitian langsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan yang telah dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada¹⁴

Jadi, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Penulis berinteraksi face to face dengan Pengurus Kelompok Ternak/.Anggota Masyarakat dan Pengurus

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 15

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 29

BUMDes Swadesa Artha Mandiri. Penulis mengumpulkan data sendiri, data didapatkan dari berbagai sumber, peneliti mengolah tema-tema menjadi serangkaian tema yang utuh, peneliti fokus mempelajari makna yang disampaikan partisipan, proses penelitian berkembang secara dinamis sesuai dengan keadaan dilapangan, peneliti menggunakan persepektif teoretis terutama persepektif pemberdayaan perempuan, peneliti menafsirkan penemuan dilapangan, dan memberikan gambaran secara kompleks dari penelitian.

Penelitian ini merupakan lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data dilapangan

2. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu Penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (Diskripsi) mengenai Situasi-Situasi atau Kejadian. Penelitian ini mencandra mengenai situasi atau Kejadian-Kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi factual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga memperoleh gambaran yang jelas.¹⁵

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya yaitu untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, penulis hanya mengemukakan dan menggambarkan secara apa adanya Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung, Tarsito, 1995), h.98

3. Tempat dan Partisipan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonomarto Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. ini juga melibatkan Kelompok Ternak/Anggota Masyarakat dan Pengurus BUMDes Populasi berjumlah 15 Orang yaitu Kelompok Ternak berjumlah 10 Orang dan Pengurus BUMDes Swadesa Artha Mandiri berjumlah 5 Orang, jadi untuk Sampel 4 Orang yang terdiri dari Ketua BUMDes Swadesa Artha Mandiri, Ketua Kelompok Ternak dan 2 Anggota Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani

Partisipan adalah orang yang dapat memberikan informasi yang diperlukan.¹⁶ Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria kriteria tertentu. Pemilihan partisipan pada penelitian ini dipilih sesuai dengan kriteria kriteria dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Ketua BUMDes Swadesa Artha Mandiri,
2. Ketua Kelompok Ternak
3. Anggota Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani

Berdasarkan kriteria tersebut maka peneliti menentukan partisipan sebanyak 15 Orang yaitu Kelompok Ternak berjumlah 10 Orang dan Pengurus BUMDes Swadesa Artha Mandiri berjumlah 5 Orang, jadi untuk Sampel 4 Orang yang terdiri dari Ketua BUMDes Swadesa Artha Mandiri, Ketua Kelompok Ternak dan 2 Anggota Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu langkah yang penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data. Untuk mendapatkan data

¹⁶Muh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005) h. 54.

dan informasi yang sesuai dan relevan, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki.¹⁷ Dalam hal ini, pastinya peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung kegiatan membuat Pupuk Kompos dengan memanfaatkan potensi lokal seperti kotoran ternak kambing yang ada di lapangan. Penelitian menggunakan observasi Non partisipan yang mana observasi dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Macam-macam observasi yaitu diantaranya, Observasi Partisipan, Observasi Non Partisipan dan Observasi Kuasi Partisipasi, dengan itu Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.

Metode ini digunakan untuk menggali data terkait proses berlangsungnya kegiatan dalam membuat Pupuk Kompos dengan memanfaatkan potensi lokal seperti kotoran ternak kambing yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pendapatan masyarakat.

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h.98

b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.¹⁸ Metode interview ini merupakan metode yang utama yang penulis gunakan dalam pengumpulan data. Dalam wawancara, (peneliti dapat melakukan *face to face interview* wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka yang terlibat di dalam penelitian ini yang terdiri dari orang partisipan. Wawancara-wawancara seperti itu tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Dalam pelaksanaan interview menggunakan interview bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan bebas kepada interviewer. Jadi yang dimaksud adalah pedoman (interview guide) yang menjadi catatan-catatan pokok yang telah diarahkan kepada persoalan. Sehingga diharapkan wawancara yang dilakukan lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendalam.¹⁹ Peneliti melakukan interview kepada partisipan untuk menggali data yang akurat. Interview yang peneliti lakukan kepada Pengurus BUMDes Swadesa Artha Mandiri dan Kelompok Ternak.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dengan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data tentang kegiatan membuat Pupuk Kompos dengan memanfaatkan potensi lokal seperti kotoran ternak kambing yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pendapatan masyarakat. Data ini dibutuhkan guna melengkapi data

¹⁸Marzuki, *Metodologi Riset....*, h. 66

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian....*,h..67

lapangan yang peneliti dapatkan, maka penulis melengkapinya dengan metode dokumentasi yang berbentuk tulisan dan catatan yang mendukung dalam memperoleh suatu data BUMDes Swadesa Artha Mandiri baik itu seperti sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, program program yang dibuat serta pelaksanaan kegiatan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.²⁰ Menurut Mileas dan Hubernman sebagaimana dikutip oleh Emzir mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Emzir mengemukakan, Reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana hendak dibuang. Mana merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang.

b. Penyajian Data

Emzir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang terus memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian penulis dapat menentukan penarikan

²⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 85

kesimpulan yang diperoleh dari sekumpulan informasi-informasi dalam proses penelitian.

c. Vertifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/vertifikasi dari suatu data. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.²¹

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data., yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan Pengurus BUMDes Swadesa Artha Mandiri dan Kelompok Ternak

²¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*...., h.195

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam ini bisa penulis maksudkan pada BAB 1 yang terdiri dari beberapa komponen seperti contoh nya latarbelakang dengan munculnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara. merupakan salah satu Lembaga yang berhasil melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dalam memnproduksi pupuk kompos dengan kotoran kambing sehingga memunculkan rumusan masalah pada Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara dengan tetap menggunakan metode kualitatif yang harus memaksimalkan banyak nya muatan teori yang dapat menjadi rujukan referensi untuk menganalisis dan berikutnya mencari data temuan yang setelah nya dari penelitian ini akan penulis tuangkan pada BAB III dari hasil pengumpulan data tersebut, baik itu dari wawancara, observasi bahkan hasil dokumentasi, setelah itu hasil dari penemuan dapat di analisis BAB IV terkait dengan teori BAB II dan temuan data pada BAB III maka dapat dipadukan, seingga kegiatan ilmiah ini dapat terlibat secara sistematis untuk mencari korelasi keduanya antara teori dan fakta temuan pada yang nantinya juga akan sampai pada kesimpulan dan saran di BAB V yang merupakan terjemahan dan penilaian subjektif penulis dari variable atau definisi operasional.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN BUMDES SEBAGAI LEMBAGA (INSTITUSI) MASYARAKAT

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat: “Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang membedakan.”²²

Menurut Ginanjar Kartasmita Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya berupaya untuk mengembangkannya, selanjutnya upaya tersebut diikuti untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.²³

Pemberdayaan adalah sebuah upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan nyata.²⁴

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses pembangunan sekelompok orang atau masyarakat dengan cara mengembangkan kemampuan masyarakat, memprakarsai, perubahan perilaku masyarakat. Dan pengorganisasian masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta

²²Totok mardikanto dan poerwoko soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.52

²³Totok Mardikanto, Poeworko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 53

²⁴ Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktek*, (kencana Prenada Media Group, Jakarta ,2013),ed.ke-1 h.24

dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada dilingkungan sekitar mereka.²⁵

Didalam upaya pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolak nya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yangh sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikiny serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Didalam rangka ini diperlukan langkah langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatankegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bawa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai

²⁵ Fajar Nugraha, *Jejak Pemberdayaan* (Bandung:Yayasan Rumah Zakat, 2019)
h. 2

fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.²⁶

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:²⁷

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk

²⁶ Aprilia Theresia, et.al, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta,cetakan kesatu, 2014), h.124

²⁷

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut memiliki kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemamouan untuk memutuskan serta melakukan suatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan kemampuan kogmitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dengan mengarahkan sumber daya yang lainnya yang bersifat fisik material.

- a. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir landasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi
- b. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan kepada perilaku yang sensitive terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan
- c. Kondisi efektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.
- d. Psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung

masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakat:

- a. Pertama, kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, kemampuan dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya
- b. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu proses yang menekankan pada upaya menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama, tetapi yang sering terjadi adalah kecenderungan primer berjalan terlebih dulu untuk mendukung kecenderungan sekunder.²⁸

Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan tahapan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Proses penyuluhan sering kali sulit dibedakan dengan kegiatan sosialisasi, karena kedua kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam proses penyadaran juga tidak berbeda dengan yang dilakukan pada proses sosialisasi.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh

²⁸Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetland International - IP, 2005), h. 53

kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau Achievement Monitoring Training (AMT), yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip prinsip pendidikan orang dewasa.²⁹

2. Pelatihan

Secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan individu, masyarakat, lembaga dan organisasi. Menurut Moekijat pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat dan metode yang lebih mengutamakan prakter dari pada teori. Sasaran pelatihan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dan mampu mendorong peningkatan ekonomi dipedesaan.

3. Pendampingan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan

²⁹ Aprilia Theresia, et.al, *ibid*, h. 236

yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Prinsip kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadaan atau kemandirian

Prinsip keswadaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulai lah dari apa yang mereka punya”.Menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.³⁰

³⁰Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *ibid*, h. 54-59

5. Strategi pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja beragam walaupun dalam satu komunitas.³¹

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan

³¹Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 87

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya
- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluasluasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.³²

Masyarakat juga sangat heterogen. Oleh karena itu tanggapan, penerimaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tentu akan berbeda. Dengan disebarluaskan kepada berbagai masyarakat, pada akhirnya akan terjadi proses penyesuaian. Keberhasilan juga akan beragam. Dalam gerakan masyarakat, model dan strategi pemberdayaan tidak bisa diseragamkan. Hal ini disesuaikan dengan

³²Ibid, h. 89

potensi, kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang tepat, karena kesalahan pendekatan justru dapat berakibat fatal. Demikian juga kesalahan dalam menangkap permasalahan, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan cara pemecahannya. Menurut Ginanjar Kartasasmita, implelementasi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga upaya:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat di akses oleh masyarakat.
- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.³³

B. Konsep BUMDes

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pedidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan

³³Sri Najiati, Agus Asmana, I nyoman N. Suryadiputra, ibid, h. 60

akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).³⁴

Beberapa pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:³⁵

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementerian desa KDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut desa tradisi berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia didesa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Pasal 213 undang-undnag nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan:

- a. Ayat 1 : “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- b. Ayat 2 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada perundang-undangan”.
- c. Ayat 3 : “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangundangan.

Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan: “Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan gula mengelola

³⁴Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4

³⁵Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015)

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.³⁶

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes di atur dalam pasal 87 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Ayat 1: “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- b. Ayat 2: “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. Ayat 3: “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya. Perbedaannya itu antara lain:

- a. Modal usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- b. Dana usaha bersal dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan kepada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan Anggota).³⁷

³⁶Ibid

³⁷Ibid, h.4-5

2. Tujuan Pendirian BUMDes

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa,
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.³⁸

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

³⁸Tujuan, Prinsip-Prinsip dan Kelembagaan BUMDes, <https://risehtunong.blogspot.com/2021/12/tujuan-prinsip-prinsip-dan-kelembagaan.html>, 2021

3. Jenis Jenis BUMDes

Ada beberapa Jenis Jenis BUMDes yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Serving

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalani bisnis sosial, yang melayani warga yaitu dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini memberikan social benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.

b. Banking

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c. Renting

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. Brokering

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. Trading

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dll.

f. Holding

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, “Desa Wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.

C. Teori Pengorganisasian

1. Pengertian Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yangf harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap masyarakat³⁹ sebagai mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an QS As-Safaat ayat 1-5 yang berbunyi:⁴⁰

³⁹Hasibuan Malayu, *Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.118

⁴⁰Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004), h.634

فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّلَايَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٥﴾

Artinya: *“Demi Rombongan yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Tuhan langit dan bumi dan apa yang beradea di antara keduanya dan tuhan tempat-tempat terbit matahari”. (QS. As-Saffat:1-5)*

Mengenai ayat ini terdapat kandungan manfaat serta konsep di dalam berorganisasi, di dalam berorganisasi kita harus mengetahui penempatan fungsi pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang logis karena tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya, dengan kata lain pengorganisasian para pelaksana tidak mempunyai pedoman kerja yang jelas dan tegas, ini yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan Menurut para ahli, ada beberapa pengertian pengorganisasian diantaranya:

Malayu S. P Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat alat yang diperlukan serta menetapkan kewenang secara relative kepada setiap indivindu yang akan melakukan aktivitas tersebut.⁴¹

⁴¹ Ibid, h. 118-119

George R. Terry, pengeorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁴²

M. Manullang, Organisasi dalam arti dinamis (Pengorganisasian) adalah proses penetapan dan pembagian pekerjaan, batasan tugas tugas atau tanggung jawab serta wewenang penetapan hubungan-hubungan antara unsur unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama secara efektif untuk pencapaian tujuan.⁴³

2. Teori-Teori Pengorganisasian

a. Teori Fusi (*The Fussion Theory*)

Teori fusi tentang pengorganisasian menekankan adanya dan pekerjaanya suatu proses fusi dalam bidang pengorganisasian. Menurut penganut teori Fungsi sebuah organisasi berusaha untuk menggunakan individu guna melaksanakan tujuan tujuannya dan sebaliknya .

b. Teori System (*The Systems Theory*)

Pada teori system pengorganisasian dianggap suatu system variable yang saling mempengaruhi satu sama lain. Bagian bagian pokok system pengorganisasian adalah

- 1) Individu
- 2) Organisasi formal atau penyusunan fungsi-fungsi
- 3) Organisasi Informal
- 4) Pola Pola Kelakuan Terbalik yang timbul dari syarat-syarat peranan organisasi yang bersangkutan dan persepsi peranan individu
- 5) Lingkungan fisik dimana pekerjaan dilakukan

⁴²Ibid, h.119

⁴³Ibid, h.119-120

3. Langkah-Langkah Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses yang mana struktur organisasi dibuat dan ditegakkan. Proses ini meliputi ketentuan dan kegiatan-kegiatan yang spesifik yang perlu untuk menyelesaikan semua tujuan organisasi, pengelompokan kegiatan ini berkaitan dengan susunan yang logis dan tugas dari kelompok kegiatan ini bagi suatu jabatan atau orang yang bertanggung jawab.⁴⁴

Adapun proses pengorganisasian adalah meliputi pembatasan dan jumlah tugas tugas, pengelompokan dan pengklasifikasikan tugas-tugas, pendelegasian wewenang diantara karyawan perusahaan. Adapun proses langkah-langkah dari pengorganisasian sebagai berikut:

- a. Tujuan, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai ; profit motive atau service motive
- b. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan mengspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
- c. Pengelompokan kegiatan-kegiatan artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan kedalam beberapa kelompok atas tujuan yang sama; kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan kedalam suatu departemen atau satu bagian.
- d. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus mentakan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen.
- e. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian.
- f. Perincian Peranan Perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas terhindarkan.

⁴⁴Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2005), h.33

- g. Tipe Organisasi artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai, apakah “*line organization, line and staff organization*” ataukah “*function organization*”.⁴⁵
- h. Struktur Organisasi (*Organization chart* = Bagan Organisasi), artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan apa struktur organisasi “segitiga vertika, segitiga horizontal, bentuk lingkaran, bentuk setengah lingkaran, bentuk kerucut vertical/horizontal atau bentuk oval”.

4. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan yang lainnya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi disebut sebagai fungsi pengorganisasian. Sedangkan pengorganisasian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para manajer untuk menetapkan hubungan kerja diantara para karyawan agar memungkinkan mereka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.⁴⁶ Dalam sumber yang lain mengatakan bahwa fungsi pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagaian bagiannya, pengelompokkan aktivitas aktivitas, penugasan kelompok kelompok aktivitas kepada manajer manjer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informal baik horizontal maupun vertical dalam struktur organisasi.⁴⁷

Fungsi pengorganisasian (*Organizing*= Pembagian Kerja) berkaitan dengan fungsi perencanaan, karena

⁴⁵Ibid, h.34

⁴⁶Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.92

⁴⁷Kadarman, Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Graha Utama, 1991), h.63

pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengertian pengorganisasian dan organisasi berbeda. *Organizing* berasal dari kata *Organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.⁴⁸

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan, fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Pengelompokan tugas-tugas dan membagi bagian pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen departemen (sub system) serta penemuan hubungan-hubungan.⁴⁹

D. Konsep Lembaga(Institusi) Masyarakat

1. Pengertian Lembaga(Institusi) Masyarakat

Secara alami manusia cenderung hidup berkelompok, dorongan masyarakat untuk hidup berkelompok tidak hanya disebabkan karena manusia itu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Tetapi juga karena kebutuhan manusia untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta tuntutan kehidupan yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Keadaan ini menyebabkan timbulnya berbagai macam kelompok dalam masyarakat, berbagai macam kelompok yang ada sering disebut dengan istilah lembaga masyarakat.⁵⁰

Lembaga masyarakat ialah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan sebuah kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan

⁴⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 20110, Edisi revisi, h.118

⁴⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 20110, Edisi revisi, h.121

⁵⁰ Wursanto, *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*, (Yogyakarta :C.V Andi Offset, 2003), h.12

masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Djoko Edi Imrah mengemukakan Lembaga masyarakat adalah sekelompok individu yang secara bersama-sama terikat oleh sebuah kepentingan dan tujuan bersama yang dicapai melalui sebuah tindakan kolektif yang menempatkan diri mereka sebagai pelaku dalam proses pemecahan masalah.⁵² Institusi lokal adalah suatu kelompok yang menampung aspirasi masyarakat, baik yang mempunyai aturan secara tertulis maupun tidak tertulis, tumbuh dalam masyarakat serta bertujuan mencapai tujuan bersama.⁵³

Sedangkan Koentjaraningrat mengemukakan lembaga masyarakat adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas manusia-manusia untuk memenuhi kompleks kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekantopun mendefinisikan lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat⁵⁴ Terbentuknya lembaga masyarakat bermula dari tumbuhnya suatu kekuatan ikatan hubungan antara manusia dalam suatu kelompok masyarakat, ikatan hubungan antara masyarakat tersebut sangat erat kaitannya dengan keberlakuan suatu norma sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan kehidupan.

Dari pengertian ini maka penulis simpulkan lembaga masyarakat merupakan sebuah kelompok individu yang bersama-sama terikat oleh sebuah kebutuhan demi mencapai kepentingan bersama dan memiliki sebuah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas masyarakat serta sebagai sebuah wadah dalam menampung aspirasi masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis namun bertujuan mencapai sebuah tujuan bersama.

⁵¹ *Ibid*, h.12

⁵² Djoko Edi Imrah, *Pemberdayaan Istitusi Lokal Dan Implikasinya Bagi Masyarakat*, Jurnal Wacana, vol 10, No.1 Januari 2009, h.82

⁵³ Wursanto, *Op.Cit*, hlm.12

⁵⁴ Philipus, Ng., Dan Nurul Aini, *Sosiologi Dan Politik*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2011), h.50

2. Tujuan dan Fungsi Lembaga(Institusi) Masyarakat
Adapun fungsi lembaga masyarakat menurut Undang-undang No.17 Tahun 2013 pasal 6 yaitu :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalu aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara ,menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemelihara dan pelestari norma ,nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Sedangkan tujuan lembaga masyarakat antara lain :

- a) Untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat
- b) Lembaga masyarakat merupakan institusi masyarakat yang bertujuan menyuarakan kepentingan yang ada di masyarakat.⁵⁵

3. BUMDes Sebagai Lembaga(Institusi) Masyarakat

BUMDes adalah lembaga (institusi) milik masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.Dalam pendiriannya BUMDes ini memiliki fungsi yang tujuannya ialah untuk masyarakat,fungsinya ialah:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Meningkatkan pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha

⁵⁵Ari Ganjar Hardiansah,Randi “Peran Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi .VOL.1,No.1,hal.52(Desember 2016).

Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainabel.⁵⁶

Pendapat lain mengemukakan fungsi BUMDes ialah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.⁵⁷

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

⁵⁶Petunjuk Teknis Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gambaran Singkat
 BUMDes, bumdesalurberjaya.blogspot.co./2017/6/petunjuk-teknis-pendirian-pengelolaan-BUMDes.html

⁵⁷Tujuan, Prinsip-Prinsip, dan Kelembagaan BUMDes,
<https://risehtunong.blogspot.com/2015/12/tujuan-prinsip-prinsip-dan-kelembagaan.html>, 2015

⁵⁸Ibid.,

BUMDes itu sendiri merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (one for all).⁵⁹

Kemudian di dalam Juknis BUMDes-BPMDK Langkat 2 menjelaskan Badan Usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan dalam UU.No.6 Tahun 2014 tentang desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan menteri Desa,PDT dan transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian ,Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Sebagai ketentuan yang termaktub dalam peraturan menteri Desa,PDT dan transmigrasi tersebut bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain bertujuan peningkatan pendapatan asli Desa (PA DESA),oleh karnanya dalam rangka pengembangan perekonomian desa dan pengelolaan potensi yang ada,desa dapat membentuk BUMDes.Sementara itu tugas dan peran pemerintah adalah melakukan penyadaran dan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

⁵⁹Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4

⁶⁰Petunjuk Teknis Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Gambaran Singkat
BUMDes,bumdesalurberjaya.blogspot.co./2017/6/petunjuk-teknis-pendirian-pengelolaan-BUMDes.html

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Arbi Sanit, 1995, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Ilmu Pembangunan, Jakarta

Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015)

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017

Dimock, 1960, *Public Administration*, Rinehart Inc., New York

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004),

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayaan Rakyat* Bandung, PT Refika Aditama, 2010

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010

Hasibuan Malayu, *Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Kadarman, Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Graha Utama, 1991)

Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2009),

Rahimsyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aprindo Jakarta, 2015

Suwarno, *Teori Sosiologi* Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012

Sri Najiati, Agus Asmana, I nyoman N. Suryadiputra, *ibid*,

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015

Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013),

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Serta PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hani Yuliwati, *Pemberdayaan Ekonomi Buruh Gedong Wanita, Jumah Masyarakat Islam Yogyakarta*: Fakultas Dakwah UIN Suka, 2007

Marzuki, *Metodologi Reset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005

Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2005), h.33

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2005

Nicholas Henry, 1998, *Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan*, Terjemahan Luciana, Rajawali Pers, Jakarta

Sanapiah Faisal, *Format Format Penelitian Sosial*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada

Tri Pranadji, 2012, *Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jakarta, Selanjutnya disebut Tri Pranadji II

Phillip Eldridge, 1989, *NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?*, Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University,

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta

Nasikun, *Sitem Sosial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2016

Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktek*, (kencana Prenada Media Group, Jakarta ,2013),ed.ke-1 h.24

Jurnal:

Viki ade maulana,rosnita,eri saya mar,"*persepsi anggota terhadap kinerja badan usaha milik desa(Bumdes)*",jurnal online bidang pertanian, vol 3, no 1

Rahyunir, *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Di Kota Pekan Baru*, Jurnal Sains Vol 4, No 1, Januari 2015

Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007),

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

REKOMENDASI PENELITIAN DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/052 /V.16/2021

- DASAR** :
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- MEMBACA** :
- Surat Permohonan dari Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B-166/Un.16/DD/TL.01/01/2021 Tanggal 18-01-2021 perihal Permohonan Izin Riset
- MEMPERHATIKAN** :
- Proposal Penelitian

MEREKOMENDASIKAN :

- Nama / NPM / NIP** : **MUHAMMAD SAFERI / 1641020118**
- Jenis Kelamin** : Laki-Laki
- Tempat/Tgl.Lahir** : Ketapang / 01-04-1998
- Alamat** : Kampung Pisang , Kel/Desa: Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara
- Pekerjaan** : Mahasiswa
- Tujuan** : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
- Lokasi Penelitian** : Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara
- Judul Penelitian** : Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara
- Waktu yang diberikan** : 20 Januari 2021 s/d 20 Maret 2021

Dengan Ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk Kepentingan Penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemohon Agar Senantiasa Mematuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 Januari 2021

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS

W.Drs. BENNY SUFIAGA, A.P., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19740907 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara.
2. Camat Kotabumi;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Cq.Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing Rukun Amrih Sentosa Sukoharjo

1. Apa latar belakang didirikannya Kelompok ternak kambing di desa Sukoharjo?
2. Apa tujuannya didirikannya Kelompok ternak kambing di desa Sukoharjo?
3. Apa peran dinas peternakan untuk mewujudkan pengembangan kelompok ternak kambing di desa Sukoharjo?
4. Siapa yang mengelola kelompok ternak kambingnya?
5. Apa saja bentuk strategi pemberdayaan yang di laksanakan oleh pihak dinas peternakan kepada kelompok ternak kambing desa sukoharjo untuk pengembangan ternaknya?
6. Kapan dan dimana strategi pemberdayaan masyarakat di desa sukoharjo di laksanakan?
7. Bersumber dari manakah dana untuk mendirikan kelompok ternak kambing?
8. Siapa saja pihak terkait dalam mengembangkan strategi perkembangan ternaknya?
9. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya kelompok ternak kambing di desa sukoharjo?
10. Apakah masyarakat di desa sukoharjo berantusias mengikuti anggota kelompok ternak dalam pengelolaan pembuatan susu kambing etawa?
11. Siapa saja yang berantusias dalam pengelolaan pembuatan susu kambing etawa?

12. Apakah pihak dinas peternakan tetap memonitoring dan mengevaluasi dalam setiap kegiatan perkembangan ternak kambing?

B. Wawancara dengan Dinas Peternakan

1. Bagaimana terbentuknya Dinas Peternakan di kabupaten pringsewu?
2. Apa Tujuan Dinas Peternakan ini dibentuk?
3. Bagaimana peran Dinas Peternakan untuk perkembangan kelompok ternak kambing?
4. Apa saja kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan?
5. Siapa yang mengelola kelompok ternak kambing di desa sukoharjo?
6. Apakah kelompok ternak berhak dan memiliki kewajiban untuk mengelola peternakannya?
7. Adakah prosedur khusus dalam mengikuti anggota kelompok ternak?
8. Apakah ada manfaat yang dirasakan dari adanya kelompok ternak kambing ini?

C. Wawancara dengan Anggota Kelompok Ternak

Pedoman Observasi

1. Mengamati aktifitas dan kegiatan masyarakat dalam kegiatan BUMdes
2. Mengamati proses pembuatan usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota BUMdes
3. Mengamati proses pemasaran usaha oleh BUMdes
4. Mengamati partisipasi masyarakat dalam program BUMdes

Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah desa Wonomarto
2. Data kependudukan desa Wonomarto
3. Data kondisi geografis desa Wonomarto
4. Sejarah berdirinya BUMdes
5. Struktur organisasi BUMdes
6. Data kegiatan dalam program BUMdes

PROSES PEMBUATAN PUPUK KOMPOS



Pembuatan Pupuk kompos



Proses pencampuran bahan-bahan pembuatan pupuk kompos

WAWANCARA



**Wawancara Bersama Bapak Ali Hasan Selaku Anggota
BUMdes**



Wawancara Bersama Bapak Dodo Selaku Tokoh dan Penggerak Masyarakat

Hasil Produksi Pupuk







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp (0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1711 / Un.16 / WR.1 / KT/ 02 / 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP : 196201111994031001
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul:

**Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa
Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUHAMMAD SAFERI	1641020118	FDIK/PMI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 10%. Dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 02 September 2021

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP.196201111994031001

Ket:

1. Surat keterangan Cek Turnitin sah, dengan stempel asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat keterangan ini dapat digunakan untuk Repository
3. Lampirkan surat keterangan dan lampiran bukti hasil turnitin ini pada waktu menjilid/mencetak skripsi (penting)

Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara

ORIGINALITY REPORT

10 %	%	3 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	7 %
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
3	Farid Madjodjo, Fadli Dahlan. "Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou", Indonesia Accounting Journal, 2020 Publication	1 %
4	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
5	Ade Palupi. "Analisis Penghambat Perkembangan Praktek Akuntansi di Badan Usaha Milik Desa", Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 2021 Publication	<1 %
6	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %

7 Neneng Rini Ismawati. "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)", Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2020 <1 %

Publication

8 Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisy Putri Cenery. "PERANAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI NAGARI CUPAK KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK.", Jurnal Ius Constituendum, 2019 <1 %

Publication

9 Stanislaus Amsikan, Yohanis Ndapa Deda. "Memanfaatkan Potensi Lokal Kefamenanu dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Kreativitas Guru SMP", Bakti Cendana, 2018 <1 %

Publication

10 Adhiela Noer Syaief. "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN MANAJEMEN BENGKEL BERBASIS 5-S DI BENGKEL MESIN OTOMOTIF POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT", Jurnal Humaniora Teknologi, 2018 <1 %

Publication

11

Arief Sumeru. "KEDUDUKAN PEJABAT KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

<1%

12

Yunia Rahayuningsih, Sofyan Budiarto, Sulastris Isminingsih. "PERAN BUMDES DALAM PENGUATAN EKONOMI DESA SUKARATU KABUPATEN SERANG, BANTEN", Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 2019

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Telp. (0721) 704030 Bandar Lampung 35131

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Saferi

NPM : 1641020118

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Pembimbing II : Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMdes (Badan Usaha Milik Desa)

Swadesa Arta Mandiri Desa Wonomarto Kabupaten Lampung Utara

No.	Tanggal Konsultasi	Hal Konsultasi	Paraf PA I	Paraf PA II
1.	25 oktober 2019	Pengajuan Judul		
2.	27 November 2019	Sidang Judul		
3.	05 Juni 2020	Konsultasi BAB I-II		
4.	12 Juli 2020	Revisi BAB I-II		
5.	23 Mei 2021	ACC Seminar Proposal		
7.	18 Juli 2021	Konsultasi BAB I-V		
8.	24 Juli 2021	Revisi BAB I-V		
9.	02 september 2021	ACC Munaqosah		

Bandar Lampung, 14 September 2021
Ketua Jurusan

Dr. M. Mawardi J. M.Si
NIP. 197306012003121002